



## REDENOMINASI RUPIAH: PELUANG DAN TANTANGANNYA

Deniza Mulia Nita\*

### Abstrak

*Redenominasi rupiah kembali menjadi perhatian dalam kebijakan moneter nasional karena dinilai mampu meningkatkan efisiensi transaksi dan memperkuat kredibilitas mata uang. Namun, implementasinya tidak terlepas dari risiko, seperti volatilitas nilai tukar, persepsi negatif akibat money illusion, serta tantangan kesiapan kelembagaan dan sosialisasi publik. Artikel ini bertujuan menganalisis pengalaman negara lain dalam melakukan redenominasi mata uang serta peluang dan tantangan implementasinya bagi Indonesia. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa keberhasilan redenominasi sangat bergantung pada stabilitas makroekonomi, koordinasi antarlembaga, dan strategi komunikasi yang efektif. Berdasarkan hasil tersebut, tulisan ini merekomendasikan kepada DPR RI khususnya Komisi XI untuk memperkuat fungsi legislasi melalui pembahasan RUU redenominasi rupiah secara komprehensif, menjalankan fungsi pengawasan terhadap kesiapan teknis pemerintah dan Bank Indonesia, serta memastikan perlindungan konsumen dan mitigasi dampak transisi sebagai bagian dari fungsi anggaran dan pengawasan.*

### Pendahuluan

Redenominasi rupiah, penyederhanaan nilai nominal mata uang seperti mengurangi tiga digit nol tanpa mengubah nilai riil, kembali menjadi isu penting dalam kebijakan moneter Indonesia. Rencana ini tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 (PMK/70/2025), dengan target pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) pada tahun 2027. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan efisiensi ekonomi, memperkuat kredibilitas rupiah, serta menyederhanakan sistem pencatatan keuangan di sektor akuntansi, perbankan, dan teknologi informasi tanpa mengubah daya beli masyarakat (Hadi, 2025).

Meskipun menawarkan manfaat jangka panjang, implementasi redenominasi masih menyimpan risiko dan tantangan. Gejolak pasar keuangan dapat terjadi jika rupiah melemah dan aliran modal keluar meningkat, terutama ketika kepercayaan investor belum stabil.

\*) Analis Legislatif Ahli Pertama Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. Email: [deniza.nita@dpr.go.id](mailto:deniza.nita@dpr.go.id)

Kondisi ini bisa memicu volatilitas dan keluarnya investor asing. Dari sisi sosial, masyarakat dan pelaku usaha menghadapi tantangan adaptasi akibat literasi keuangan yang terbatas, potensi “*money illusion*”, serta kemungkinan inflasi sementara akibat pembulatan harga. Selain itu, biaya logistik seperti pencetakan uang baru, pembaruan sistem teknologi informasi perbankan, dan kebutuhan sosialisasi publik juga diperkirakan cukup besar (Valenta, 2025). Redenominasi rupiah sangat berkaitan dengan kondisi makroekonomi, stabilitas keuangan, perilaku sosial-ekonomi, dan kesiapan kelembagaan. Artikel ini menganalisis pengalaman negara lain dalam melakukan redenominasi mata uang serta peluang dan tantangan implementasinya bagi Indonesia.

### **Kebijakan Redenominasi Mata Uang di Negara Lain**

Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa keberhasilan redenominasi sangat dipengaruhi stabilitas makro dan kualitas komunikasi publik. Redenominasi mata uang di negara Ghana pada tahun 2007 dianggap sebagai salah satu contoh sukses dimana pemerintah melakukan reformasi menyeluruh pada sistem pembayaran, komunikasi publik yang intensif, dan koordinasi antarlembaga sehingga transisi berjalan relatif mulus. Temuan studi menunjukkan bahwa persepsi publik dan pengelolaan ekspektasi menjadi faktor kunci dalam mencegah *money illusion* dan menjaga stabilitas pasca-implementasi (Obuobi *et al.*, 2020). Selain Ghana, Turki juga berhasil menghapus enam nol setelah stabilisasi inflasi yang kuat dan reformasi fiskal yang konsisten, sehingga redenominasi menjadi simbol keberhasilan kebijakan ekonomi. Sebaliknya, Zimbabwe dan Venezuela menunjukkan bagaimana redenominasi berulang kali gagal ketika dilakukan di tengah hiperinflasi dan runtuhnya kepercayaan publik. Tanpa perbaikan fundamental, redenominasi hanya menjadi tindakan kosmetik yang tidak mampu memulihkan nilai mata uang atau mengendalikan inflasi. Brazil memberikan contoh fleksibel: beberapa putaran redenominasi dilakukan dalam rangkaian program stabilisasi makro yang lebih luas hingga terbentuk lingkungan yang akhirnya memungkinkan keberhasilan *Plano Real* (Udo & Agbai, 2023).

Dengan demikian, upaya redenominasi rupiah memerlukan kesiapan ekonomi yang memadai, tata kelola komunikasi publik yang kuat, serta koordinasi antarlembaga yang konsisten. Pengalaman internasional menunjukkan bahwa redenominasi hanya efektif apabila menjadi bagian dari strategi stabilitas makro yang lebih luas, bukan langkah tunggal yang berdiri sendiri. Indonesia, dengan rekam jejak wacana redenominasi sebelumnya, kini memiliki peluang untuk belajar dari kegagalan dan keberhasilan negara lain dalam merancang implementasi yang lebih matang, terukur, dan berkelanjutan.

Upaya redenominasi rupiah bukanlah gagasan baru dalam kebijakan moneter Indonesia. Bank Indonesia pertama kali mengajukan wacana ini pada tahun 2010–2013 melalui penyusunan RUU Redenominasi, yang saat itu disiapkan sebagai bagian dari reformasi nilai tukar dan modernisasi sistem pembayaran. Namun, rencana tersebut tertunda akibat ketidakpastian ekonomi global serta kesiapan perlunya konsolidasi fiskal dan moneter.

Pemerintah kembali menghidupkan wacana redenominasi melalui PMK/70/2025 yang memasukkan program ini dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan. Pembaruan wacana ini menunjukkan konsistensi arah kebijakan jangka panjang untuk meningkatkan efisiensi transaksi, memperkuat kredibilitas rupiah, serta menyederhanakan sistem pelaporan keuangan nasional (Gamary, 2025).

### **Peluang Redenominasi Rupiah**

Redenominasi rupiah memiliki sejumlah dampak positif bagi perekonomian Indonesia, terutama dalam jangka panjang. Salah satu manfaat utamanya adalah meningkatkan efisiensi dalam transaksi sehari-hari, administrasi keuangan, dan pencatatan akuntansi. Penyederhanaan digit nominal akan mempermudah proses pembayaran, mengurangi potensi kesalahan pembukuan, dan mengurangi beban sistem informasi di sektor perbankan dan dunia usaha (Ifunanya *et al.*, 2021). Negara yang berhasil melakukan redenominasi mengalami peningkatan efisiensi sistem pembayaran karena struktur angka yang lebih sederhana, sebagaimana terlihat pada kasus Turki dan Ghana.

Selain meningkatkan efisiensi, redenominasi juga memiliki manfaat simbolis dan psikologis yang cukup penting. Penyederhanaan nilai nominal dapat memperkuat persepsi stabilitas rupiah dengan menempatkannya sejajar dengan mata uang global yang memiliki struktur nominal lebih ringkas. Perubahan ini berpotensi meningkatkan kepercayaan publik dan investor, terutama apabila diiringi dengan kebijakan makroekonomi yang kredibel. Selain itu, persepsi nilai mata uang memiliki pengaruh terhadap kepercayaan konsumen dan stabilitas jangka panjang, sehingga redenominasi dapat menjadi instrumen untuk membangun citra positif ekonomi nasional (Udo & Agbai, 2023). Dalam jangka panjang, redenominasi juga dapat mendukung proses modernisasi ekonomi, termasuk integrasi sistem keuangan, penguatan sistem pembayaran digital, dan efisiensi biaya pencetakan uang. Jika dilakukan dalam kondisi makroekonomi yang stabil dan didukung komunikasi publik yang kuat, manfaat-manfaat ini dapat melampaui biaya transisi, menjadikan redenominasi sebagai langkah strategis menuju peningkatan efektivitas kebijakan moneter dan penguatan kredibilitas rupiah (Karnadi & Adijaya, 2017).

### **Tantangan Redenominasi Rupiah**

Implementasi redenominasi rupiah memiliki risiko makroekonomi yang perlu dikelola secara hati-hati. Salah satu tantangan utamanya adalah kemungkinan munculnya volatilitas nilai tukar, terutama apabila kebijakan ini dilaksanakan saat rupiah berada dalam tekanan atau ketika pasar global kurang stabil (Valenta, 2025). Beberapa negara menunjukkan bahwa pasar dapat mengalami kecenderungan *overreaction* akibat perubahan nominal, terutama jika ekspektasi inflasi tidak dikelola dengan baik. Selain itu, risiko *money illusion* berpotensi mendorong kenaikan harga barang dan jasa dalam

jangka pendek, terutama pada sektor ritel dan UMKM (Pambudi, Juanda, & Priyarsono, 2014). Jika tidak disertai komunikasi publik yang kuat, transisi dapat menurunkan kepercayaan konsumen dan pelaku usaha. Beberapa studi kajian redenominasi juga menekankan bahwa keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada stabilitas inflasi sebelum implementasi, karena inflasi tinggi akan memperbesar risiko kegagalan transisi (Hamdhi, 2025).

Tantangan lainnya berkaitan dengan kesiapan kelembagaan di sektor fiskal, moneter, perbankan, dan sistem pembayaran. Otoritas perlu memastikan koordinasi yang kuat antara Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, OJK, perbankan, dan pelaku industri keuangan lain untuk menyelaraskan proses pembaruan sistem, mulai dari pencetakan uang baru, pembaruan perangkat lunak perbankan, hingga sistem kasir dan pembukuan di sektor swasta (Pratomo, 2025). Negara yang berhasil melakukan redenominasi memiliki dukungan institusional yang kuat, terutama pada aspek regulasi dan kesiapan sistem informasi. Tanpa kesiapan tersebut, biaya transisi dapat meningkat dan risiko kesalahan transaksi juga bertambah. Tantangan sosialisasi publik juga sangat besar; keberhasilan Ghana, misalnya, ditopang oleh kampanye nasional berskala luas yang mengurangi kesalahpahaman masyarakat dan meminimalkan resistensi psikologis (Obuobi *et al.*, 2020).

## Penutup

Secara keseluruhan, redenominasi rupiah merupakan langkah strategis yang berpotensi meningkatkan efisiensi ekonomi, memperkuat kredibilitas mata uang nasional, serta mendukung modernisasi sistem keuangan Indonesia. Namun, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada stabilitas makroekonomi, kesiapan infrastruktur kelembagaan, serta efektivitas komunikasi publik untuk meminimalkan risiko mispersepsi dan gejolak sosial-ekonomi selama masa transisi.

Dalam konteks tata kelola nasional, DPR RI khususnya Komisi XI bersama pemerintah memegang peran sentral dalam memastikan proses perumusan dan pembahasan RUU Redenominasi berjalan secara komprehensif, berbasis bukti, dan mengutamakan kepentingan publik. Dalam hal ini, DPR RI tidak hanya melakukan pengawasan terhadap kesiapan implementasi kebijakan, tetapi juga memastikan bahwa aspek perlindungan konsumen, beban transisi bagi pelaku usaha, serta mitigasi risiko inflasi tersusun secara jelas dalam kerangka regulasi. Dengan koordinasi yang kuat antara pemerintah, Bank Indonesia, OJK, dan DPR RI, Indonesia memiliki peluang besar untuk melaksanakan redenominasi secara lebih terukur, kredibel, dan berkelanjutan sehingga manfaat jangka panjangnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

## Referensi

- Alhusain, A. S. (2012, Desember). *Rencana redenominasi rupiah* (Info Singkat Vol. IV No. 24/II/P3DI). Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal DPR RI. [https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-IV-24-II-P3DI-Desember-2012-32.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-IV-24-II-P3DI-Desember-2012-32.pdf)
- Gamary, M. G. (2025). Redenominasi mata uang rupiah. Direktorat Jenderal Perbendaharaan – Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikaping/id/data-publikasi/artikel/3268-redenominasi-mata-uang-rupiah.html>
- Hamdhi, A. (2025). Indonesia can learn currency redenomination from Turkey, Ghana. *Jakarta Globe*. <https://jakartaglobe.id/business/indonesia-can-learn-currency-redenomination-from-turkey-ghana>
- Ifunanya, O. C., Nduka, A. J., & Ogochukwu, O. V. (2021). Redenomination of Naira: A strategy for inflationary reduction. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 11(2), 472–481. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v11-i2/8860>
- Karnadi, E. B., & Adijaya, P. R. (2017). Redenomination: Why is it effective in one country but not in another?. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(3), 186–195.
- Obuobi, B., Nketiah, E., Awuah, F., Agyeman, F. O., Ofosu, D., Adu-Gyamfi, G., Adjei, M., & Amadi, A. G. (2020). Impact of currency redenomination on an economy: An evidence of Ghana. *International Business Research*, 13(2), 62–73. <https://doi.org/10.5539/ibr.v13n2p62>
- Pambudi, A., Juanda, B., & Priyarsono, D. S. (2014). Penentu keberhasilan redenominasi mata uang: Pendekatan historis dan eksperimental. *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, 17(2), 167–196. <https://doi.org/10.21098/bemp.v17i2.48>
- Pratomo, G. Y. (2025, November). OJK dan BEI buka-bukaan soal dampak redenominasi rupiah ke pasar modal Indonesia. *Liputan6*. <https://www.liputan6.com/saham/read/6213490/ojk-dan-bei-buka-bukaan-soal-dampak-redenominasi-rupiah-ke-pasar-modal-indonesia>
- Valenta, E. (2025, November 10). Weak rupiah, capital outflows could complicate Indonesia's redenomination plan: Analysts. *Business Times*. <https://www.businesstimes.com.sg/international/asean/weak-rupiah-capital-outflows-could-complicate-indonesias-redenomination-plan-analysts>

